**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**(PENYELARASAN)**

Nama Organisasi : DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA BARAT

Tugas : melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, meliputi sub urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), sub urusan pelayaran, sub urusan penerbangan dan sub urusan perkeretaapian yang menjadi kewenangan provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Fungsi : a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, yang menjadi kewenangan Provinsi;

1. penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang perhubungan, yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. penyelenggaraan administrasi Dinas;
3. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
4. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

**INDIKATOR KINERJA UTAMA :**

| **No.** | **Sasaran** | **Indikator Kinerja Utama** | **Penjelasan Formulasi** | **Sumber Data** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan moda transportasi umum | Prosentase Jaringan Trayek AKDP yang terevaluasi di Jawa Barat | Perbandingan Jumlah Jaringan Trayek AKDP yang terevaluasi di Jawa Barat | Bidang Transportasi Darat |
| Prosentase Keikutsertaan Kabupaten/Kota Dalam WTN | Perbandingan Jumlah kabupaten/kota yang ikut serta dalam WTN dengan Kabupaten/Kota di Jawa Barat | Bidang Transportasi Darat |
| Prosentase Kepemilikan Armada Angkutan Umum (AKDP) Perseorangan menjadi berbadan Hukum | Perbandingan Jumlah ijin perseorangan yang telah berbadan hukum AKDP Di Jawa Barat dengan jumlah ijin AKDP di Jawa Barat | Bidang Transportasi Darat |
| Prosentase ketersediaan terminal type B yang memenuhi standar | Perbandingan Jumlah terminal type B yang memenuhi standar dengan jumlah terminal Type B di Jawa Barat | Bidang Transportasi Darat |
| 2 | Meningkatnya ketertiban lalu lintas angkutan umum | Prosentase Angkutan penumpang umum (AKDP) yang daftar ulang kartu pengawasan | Perbandingan Jumlah Angkutan penumpang umum (AKDP) yang daftar ulang kartu pengawasan dengan jumlah AKDP | Bidang Transportasi Darat |
| 3. | Meningkatnya Ketersedian Prasarana Transportasi | Prosentase ketersediaan prasarana transportasi udara (Penyusunan Dokumen Perencanaan BIJB, Pembebasan Lahan BIJB dan Pengembangan Bandara Nusawiru) | Perbandingan Jumlah kebutuhan anggaran untuk mencapai indikator Prosentase ketersediaan prasarana transportasi udara (Penyusunan Dokumen Perencanaan BIJB, Pembebasan Lahan BIJB dan Pengembangan Bandara Nusawiru) | Bidang Transportasi Udara, Balai Pengelolaan Bandar Udara |
| Prosentase Ketersediaan Prasarana Transportasi Laut dan ASDP (Penyusunan Dokumen Perencanaan Laut dan ASDP, Pembebasan Lahan Pelabuhan Laut Pengumpan) | Perbandingan Jumlah kebutuhan anggaran untuk mencapai indikator Prosentase Ketersediaan Prasarana Transportasi Laut dan ASDP (Penyusunan Dokumen Perencanaan Laut dan ASDP, Pembebasan Lahan Pelabuhan Laut Pengumpan | Bidang Transportasi Laut dan ASDP, Balai Pengelolaan ASDP, Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut |
| Prosentase penyediaan prasarana kereta api di Jawa Barat (dokumen perencanaan, pembebasan lahan, sosialisasi) | Perbandingan Jumlah kebutuhan anggaran untuk mencapai indikator Prosentase penyediaan prasarana kereta api di Jawa Barat (dokumen perencanaan, pembebasan lahan, sosialisasi) | Bidang Perkeretaapian |
| 4. | Meningkatkan ketersediaan perlengkapan jalan di ruas jalan Provinsi | Prosentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan di jalan Provinsi | Perbandingan Jumlah Fasilitas perlengkapan jalan di Jalan Provinsi dengan kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan di jalan Provinsi | Bidang Transportasi Darat, Balai Pengelolaan LLAJ Wilayah I, II, III dan IV |